



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 26 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Komisi;
 - b. bahwa sesuai usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di komisi-komisi dan berdasarkan berita acara hasil rapat tentang pemilihan pimpinan komisi, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi, maka perlu ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**

KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi -Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dengan masa jabatan ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 30 September 2014

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

ttd

I. TEGUH RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172/ 26 Tahun 2014
Tanggal : 30 September 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	FATKHUR ROHMAN, SH	WAKIL KETUA	F. PKB
3	ACARA ARIANI, S.Psi	SEKRETARIS	F. NURANI NASDEM
4	JUNAENAH	ANGGOTA	F. PDI.P
5	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
6	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
8	TUHLAN	ANGGOTA	P. PD
9	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
10	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PAN PKS

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	EDI SISWANTO, S.Sos	KETUA	F. PD
2	KHOMIDAH, S.Pd.I	WAKIL KETUA	F. NURANI NASDEM
3	MAULANA YUSUP, S.IP	SEKRETARIS	F. PKB
4	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
6	I'ANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
7	A LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
9	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
10	MUH. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
11	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS

3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. SUNARTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	TEGUH	WAKIL KETUA	F. PD
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	SEKRETARIS	F. PKB
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
5	JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
6	BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. PG
7	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
8	H. NURFAIZIN, S.Ag	ANGGOTA	F. PPP
9	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
10	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	SUUDI, S.Ag	KETUA	F. PKB
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	SEKRETARIS	F. PD
4	PAJIMAN	ANGGOTA	F. PDI.P
5	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
6	TRİYANTO	ANGGOTA	F. PG
7	SRI UMAMI	ANGGOTA	F. PG
8	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
9	KARMUBIT	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
10	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

ttd

I. TEGUH RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARHYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001